

PENDAMPINGAN PENERAPAN DISIPLIN POSITIF PADA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA PUSAT

Ani Interdiana Candra Sari¹, Vella Anggresta², Deden Ibnu Aqil³

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia¹²³

aniinterdianacs@gmail.com¹, vellaanggresta@gmail.com², den.aqil@gmail.com@gmail.com³

ABSTRAK

Latar belakang penerapan disiplin positif di sekolah berasal dari kebutuhan untuk pendekatan yang lebih efektif dalam membentuk karakter siswa. Disiplin tradisional, yang sering melibatkan hukuman fisik atau verbal, terbukti kurang efektif dalam jangka panjang dan dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional siswa. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berdasarkan disiplin positif di sekolah penggerak. Metode pelaksanaan menggunakan alur merdeka yang mencakup tahapan mulai dari introspeksi diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, hingga rencana aksi nyata. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mengikuti alur Merdeka dengan baik. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dengan guru-guru di sekolah mereka guna menyusun implementasi disiplin positif di sekolah masing-masing.

Kata Kunci: Disiplin Postif, Pendampingan, SD, Jakarta Pusat

Received: Juli 2024	Accepted: Juli 2024	Published: Juli 2024
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Disiplin di sekolah tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari keluarga. Peran lingkungan keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap siswa. Anak-anak yang telah terbiasa dengan kedisiplinan di rumah cenderung lebih mudah menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah. Karena itu, kolaborasi antara guru dan orang tua sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam pendidikan anak.

Tantangan yang dihadapi guru saat ini adalah bagaimana menerapkan kedisiplinan pada siswa. Dulu, guru sering menggunakan ancaman, hukuman, dan kontrol yang ketat untuk mendisiplinkan siswa. Namun, seiring berjalannya waktu, metode ini menjadi kurang relevan untuk anak-anak generasi sekarang, yaitu Gen-Z. Pergeseran dari pendekatan stimulus-respons ke teori kontrol membantu guru dalam menerapkan

kedisiplinan yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan yang dipakai pun harus disesuaikan dengan kondisi era yang berbeda.

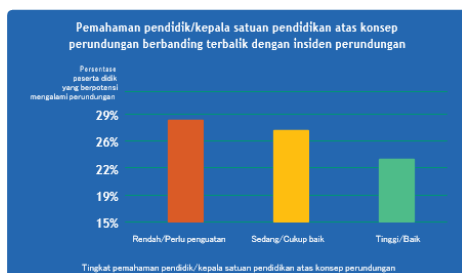
Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah awal untuk mengarahkan kembali dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia guna mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia agar menjadi unggul, kompetitif, berkarakter kuat, dan memiliki kemampuan berpikir kritis dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa maupun guru. Merdeka Belajar juga memberikan kebebasan dalam penyampaian materi yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan karakter siswa, serta memberi guru kebebasan untuk menerapkan metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan secara bertanggung jawab.

Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, terutama pada bagian keempat mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan, menyatakan bahwa Pasal 12 mengatur penciptaan suasana belajar yang menarik, aman, dan bebas dari perundungan, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspirasi siswa, tidak terbatas pada ruang kelas, serta mengakomodasi perbedaan gender, budaya, bahasa daerah, agama, karakteristik, dan kebutuhan siswa.

Kondisi pendidikan di Indonesia dapat dilihat melalui hasil asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasil asesmen ini berfungsi sebagai laporan pendidikan Indonesia, menggabungkan berbagai data pendidikan yang digunakan oleh sekolah dan dinas pendidikan untuk mengidentifikasi pencapaian, permasalahan mendasar, serta tantangan pendidikan, sehingga dapat dirancang perbaikan yang berbasis data secara efektif.

Pengukuran iklim keberagaman di lingkungan pendidikan di Indonesia didasarkan pada empat aspek utama, yaitu sikap inklusif, komitmen nasionalisme, toleransi agama dan budaya, serta dukungan terhadap kesetaraan hak di antara berbagai kelompok. Dari hasil pengukuran, 32% lembaga pendidikan di Indonesia telah membiasakan sikap keberagaman, sementara 59% masih memerlukan penguatan, dan 9% lainnya perlu ditingkatkan.

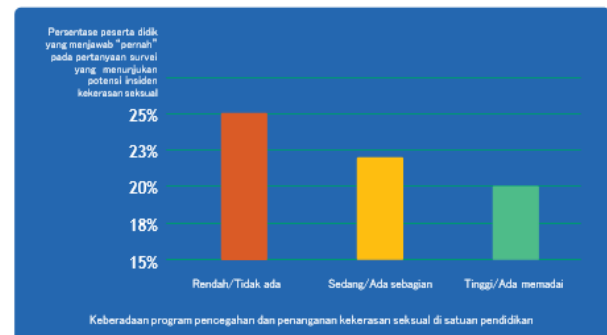
Terkait dengan keamanan di sekolah, sekitar 24,4% siswa berpotensi menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah dalam setahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pendidik dan kepala sekolah mengenai konsep perundungan, semakin sedikit kejadian yang terjadi, seperti yang ditampilkan dalam grafik berikut:



Gambar 1.

Grafik pemahaman pendidik atas konsep perundungan

Sebanyak 22,4% siswa menjawab "Pernah" saat ditanya mengenai potensi insiden kekerasan seksual dalam survei. Namun, sekolah-sekolah yang menerapkan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual cenderung memiliki risiko kekerasan seksual yang lebih rendah. Ini terlihat dalam grafik berikut: .



Gambar 2.

Persentase potensi insiden kekerasan seksual

Hasil survei tentang lingkungan belajar terkait keamanan sejalan dengan temuan Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021, yang mengungkapkan bahwa 34% anak laki-laki dan 41,05% anak perempuan pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa jika pemikiran dan perilaku positif peserta didik tidak dikembangkan secara efektif melalui pendidikan dan pembinaan, mereka berisiko menjadi pelaku atau korban kekerasan.

Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan ramah anak untuk membangun pemikiran serta perilaku positif peserta didik. Pendekatan ini dapat diterapkan baik oleh pendidik di sekolah maupun orang tua di rumah. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah disiplin positif, yang dapat diimplementasikan di satuan pendidikan untuk mendukung pembentukan Profil Pelajar Pancasila serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Disiplin positif berfokus pada pengembangan pemikiran dan perilaku positif peserta didik, sehingga mereka mampu mengendalikan perilaku mereka sendiri melalui pemahaman dan kesadaran, serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan perilaku mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain.

PENDAMPINGAN PENERAPAN DISIPLIN POSITIF PADA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA PUSAT

Sari, Anggresta, & Aqil (2024)

Pendekatan disiplin positif tidak hanya berkaitan dengan peserta didik, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana orang dewasa mendidik dan membina pemikiran serta perilaku positif peserta didik. Dengan pendekatan ini, perubahan pemikiran dan perilaku peserta didik terjadi sebagai hasil dari cara pembinaan yang diterapkan oleh pendidik. Lickona (1991) menyatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan nilai-nilai karakter. Beberapa nilai karakter yang penting untuk dikembangkan meliputi kejujuran, keterbukaan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, kebaikan, gotong royong, kasih sayang, keberanian, dan nilai-nilai demokrasi. Di antara nilai-nilai karakter ini, disiplin diri menjadi salah satu yang paling penting untuk ditanamkan.

Penerapan disiplin positif di sekolah harus menjadi upaya kolektif seluruh warga sekolah dalam mendidik dan membina peserta didik. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan mendapatkan perlakuan yang konsisten dari semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

METODE

Strategi kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan langkah alur kegiatan sebagaimana berikut ini :

Tabel 1.
Alur Kegiatan

Alur Merdeka	Aktivitas
Pembukaan	Penjelasan tentang agenda dan tujuan kegiatan pendampingan serta kesepakatan aturan selama proses pendampingan berlangsung. Sesi pengenalan.
Refleksi diri	Peserta merefleksikan pengalaman pribadi terkait disiplin di sekolah.
Pemenahaman Konsep	Penjelasan konsep terkait disiplin positif.
Sesi Kolaborasi	Peserta secara berkelompok mendiskusikan contoh kasus terkait disiplin positif.

Alur Merdeka	Aktivitas
Demonstrasi dalam konteks nyata	Peserta memaparkan hasil diskusi di sesi ini
Pendalaman Pemahaman	Peserta merefleksikan hasil diskusi yang telah dilakukan Peserta berbagi hasil refleksi
Menghubungkan Materi	Diskusi klasikal dan membuat kesimpulan terkait disiplin positif.
Penyusunan Rencana Aksi Nyata	Bagi Guru: Menyusun keyakinan kelas. Bagi Kepala Sekolah: Menyusun rencana dukungan bagi guru dalam menerapkan disiplin positif. Bagi Pengawas Sekolah: Menyusun rencana dukungan bagi sekolah dalam menerapkan disiplin positif.
Penutup	Evaluasi Penutup

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pembukaan kepada guru-guru dalam menyikapi perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka dalam perubahan kurikulum merupakan siklus yang harus dilaksanakan dalam system pendidikan nasional. Perubahan kurikulum memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk beradaptasi sesuai pedoman yang berlaku. Salah satu hal yang perlu diketahui dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini adalah bagaimana menciptakan kondisi sekolah yang aman dan kondusif. Karena alasan ini, diberikan pemahaman melalui presentasi dan dialog kepada para guru terkait pengetahuan, dan keterampilan Menyusun modul ajar kepada 24 orang guru di SDN yang di tunjuk sebagai sekolah penggerak pada lingkup daerah Jakarta Pusat. Adapun bentuk luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rencana aksi nyata pada sekolah yang mengikuti kegiatan ini dan artikel publikasi pada jurnal nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PelaksanaanKegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alur Merdeka dengan uraina Langkah berikut:

1. Pembukaan
2. Refleksi diri
3. Pemahaman konsep
4. Sesi kolaborasi
5. Demonstrasi dalam konteks nyata
6. Pendalaman pemahaman
7. Menghubungkan materi
8. Penyusunan rencana aksi

Hasil Pelaksanaan Program

1. Pemahaman kurikulum merdeka

Peserta mendengarkan presentasi narasumber yang disertai sesi tanya jawab terkait Kurikulum Merdeka. Para peserta juga terlibat dalam diskusi mengenai kondisi pembelajaran saat ini serta hal-hal yang perlu diperbaiki dan diubah. Seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2022), keberhasilan penerapan kurikulum di sekolah sangat bergantung pada komitmen kepala sekolah dan guru dalam merangkul perubahan yang dibutuhkan.

Menurut penelitian oleh Wantina & Melisa (2023), guru menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, termasuk komunikasi yang kurang memadai dari pemerintah mengenai kurikulum tersebut, pelatihan guru yang tidak cukup untuk transisi, dan ketergantungan yang masih kuat pada buku teks dan panduan sebagai sumber utama pembelajaran.

Kurikulum Merdeka adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen (2022), langkah pertama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah memahami peraturan yang berlaku, di mana sejak tahun ajaran 2023/2024 pemerintah telah mengharuskan seluruh sekolah untuk secara bertahap menerapkan kurikulum ini sesuai dengan kesiapan masing-masing. Dari perspektif akademik, Indonesia menghadapi tantangan serius pasca-pandemi COVID-19, dengan hasil laporan PISA yang menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam literasi dan numerasi dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia dan Singapura. Kurikulum Merdeka dirancang untuk membantu pemulihan pembelajaran setelah pandemi dan merespons hasil PISA, di mana banyak siswa mengalami learning loss atau ketertinggalan pembelajaran.

Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk membantu adaptasi terhadap teknologi.



Gambar 3.

Paparan oleh narasumber

2. Pendampingan disiplin positif

Pemerintah melalui kementerian pendidikan berupaya melindungi masa depan anak-anak Indonesia dengan menyusun dan menerapkan undang-undang terkait perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Perlindungan anak melibatkan berbagai tindakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi maksimalnya. Pendidikan juga harus mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, orang tua, budaya, bahasa, dan nilai-nilai, serta mempersiapkan anak untuk hidup bertanggung jawab dalam masyarakat dengan semangat pengertian, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antarbangsa, suku, dan agama, termasuk menghormati anak-anak dari komunitas adat dan menjaga lingkungan alam.

PENDAMPINGAN PENERAPAN DISIPLIN POSITIF PADA SEKOLAH DASAR DI JAKARTA PUSAT

Sari, Anggresta, & Aqil (2024)

Kegiatan ini menggunakan alur Merdeka yang pertama, yaitu "Mulai Dari Diri Sendiri," di mana peserta berbagi pengalaman pribadi terkait pelanggaran di sekolah sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas yang harus menangani situasi tersebut.

Langkah kedua adalah "Eksplorasi Konsep," yang menjelaskan konsep disiplin positif, mencakup beberapa teori seperti teori kontrol, makna disiplin, nilai kebajikan universal, teori motivasi, dan konsep "punished by reward" (dihukum oleh penghargaan). Pendekatan ini melibatkan lima posisi kontrol yang menjadi peran peserta, serta menekankan pentingnya keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan penciptaan dunia berkualitas. Disiplin positif juga menggabungkan konsep segitiga restitusi.

Langkah ketiga adalah "Ruang Kolaborasi," di mana peserta dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan contoh kasus terkait disiplin positif. Setiap kelompok akan menganalisis kasus yang diberikan di lembar kerja ruang kolaborasi dan mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok lain.

Langkah keempat adalah "Demonstrasi Kontekstual," di mana peserta yang telah berdiskusi tentang kasus tersebut memaparkan hasil diskusi di depan kelas untuk mendapatkan umpan balik dari peserta lainnya. Setiap kelompok bertanggung jawab menjadi kelompok hadirin bagi kelompok penyaji, memberikan komentar, tanggapan, dan saran yang konstruktif. Kelompok lain juga diperbolehkan memberikan tanggapan atau pertanyaan setelah kelompok hadirin.

Langkah kelima adalah "Elaborasi Pemahaman," di mana peserta mengklarifikasi pemahaman mereka tentang penerapan disiplin positif dalam praktik. Peserta diminta untuk merefleksikan konsep-konsep inti yang telah dibahas, dan bagaimana posisi kontrol yang biasa mereka gunakan sebelum mempelajari modul ini serta posisi mana yang akan mereka gunakan setelahnya. Mereka juga diminta untuk memikirkan kendala yang mungkin muncul saat menerapkan budaya positif di sekolah, serta solusi yang dapat dilakukan.

Langkah terakhir adalah "Koneksi Antar Materi," di mana peserta berdiskusi mengenai keterkaitan materi lokakarya dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah, serta menyusun rencana aksi nyata dalam bentuk praktik di sekolah.

Febriandari (2017) menjelaskan bahwa dengan menerapkan metode disiplin positif, pembentukan karakter siswa SD dapat dilakukan tanpa menggunakan hukuman atau kekerasan. Guru dapat menanamkan disiplin pada siswa dengan memperkuat perilaku positif, sehingga siswa belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri tanpa merasa terpaksa.



Gambar 4.

Diskusi pada saat pendampingan

3. Praktik Menyusun strategi disiplin positif

Seluruh peserta diminta untuk menyusun rencana aksi nyata di sekolah masing-masing, mengikuti format yang telah disediakan dalam langkah terakhir, yaitu menyusun "Rencana Aksi Nyata." Peserta diharapkan mampu merancang bentuk dukungan bagi sekolah dalam menerapkan disiplin positif untuk para guru dengan cara membuat keyakinan kelas.

Kegiatan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang memperkuat keberadaan program pendampingan disiplin positif, seperti yang ditunjukkan oleh Nurishlah et al. (2022). Disiplin positif memberikan berbagai manfaat penting bagi guru dan siswa di SD/MI, termasuk membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, memotivasi, dan memberdayakan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Penelitian Sulvinajayanti, et al., (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pengasuhan dengan disiplin positif Islami efektif dalam mengubah pandangan orang tua terhadap kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidra.



Gambar 5.

Foto bersama peserta kegiatan

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan ini telah menjalankan alur Merdeka dalam pelaksanaannya. Peserta mengikuti kegiatan dengan baik sesuai tahapan alur. Peserta antusias mengikuti kegiatan tersebut dan bertekad untuk berbagi kepada guru-guru di sekolahnya untuk bersama-sama menyusun implementasi disiplin positif di sekolah masing-masing.

Saran

Dari kegiatan yang dilaksanakan di SD Jakarta Pusat mengenai pendampingan disiplin positif, maka diperlukan tindak lanjut terkait untuk memonitoring rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriandari. (2017). Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak SD. Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2017.
- Lickona, T. (1991). *Educating For Character*. New York: Bantam Books.
- Nurishlah, L., Subiyono, S., & Hasanah, I. (2022). Implementasi Disiplin Positif di SD/MI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (12), 643–655.
- Rahayu, Restu, et al. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 6313-6319.
- Sulvinajayanti, S., Saleh, A. A., & Hamang, M. N. (2021). Pengasuhan Disiplin Positif Islami Sebagai Upaya Penurunan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sidrap. *Jurnal Penelitian*, 15(1), 77-110.